

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir dan Fatkhul Muin. 2015. *Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amin Suprihatini. 2018. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Ahmad Ibrahim Al-Nisaburi. 2010. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Indonesia.
- Mintzberg, Henry. 2000. *Kebangkitan dan Keruntuhan Perencanaan Strategis*. Terjemahan oleh Hendra Teguh. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Rangkap Jabatan: Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriyono, Bambang. 2019. *Pembangunan Desa dan Permasalahannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lexy, J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ma'arif, Syamsul. 2015. *Pembangunan Desa Berkelanjutan: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul Qamar. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Praktis dalam Penelitian Ilmu Hukum*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet. 6. Bandung: Alfabeta.

Usman Husaini dan Akbar Purnomo Setiadi. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara..

Mertokusumo, Soedikno. (1999). Masalah dan Problematika dalam Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Dhaniswara. (2022) Aspek Hukum Rangkap Jabatan. Jakarta: UKI Press.

Poerwadarminta. (2006) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang Undang / Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022.

Undang- Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Website

"Smart Desa Trenggalek." Diakses pada 5 Agustus 2024.

<https://smartdesa.trenggalekkab.go.id/>

Sumber online: "*Problematika Rangkap Jabatan PJ Kades terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah*" di *EduChannel.id*. Diakses pada 19 Agustus 2024, dari

<https://educhannel.id/artikel/umum/problematika.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Jurnal

Al-Mawardi. 1978.*Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Kairo: Darul Ma'arif.

Galanter, Marc. 1989. *Law and Society in Modern India*. New Delhi: Oxford University Press.

Hadjon, Philipus M. 1987.*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Denzin, Norman K., dan Yvonna S. 2000. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Jimmlly, Prof. (2005). "Kesenjangan Harapan dan Kenyataan dalam Penelitian." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 112-120.
- Lestari, R. (2021). "Pengaruh Rangkap Jabatan terhadap Kinerja Karyawan di Sektor Publik." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(1), 45-58.
- Santosa, Y. (2020). "Rangkap Jabatan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Organisasi." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(3), 120-134.
- May Lim Charity. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No 1 (2016), hlm. 6.
- Siti Zuhro. "Good Governance dan Pemberantasan Korupsi: Menggagas Solusi untuk Mengatasi Masalah Rangkap Jabatan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 10, no. 2 (2022): 45-60.
- Al-Mawardi. *al Ahkam al-Sulthaniyyah*, Alih Bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, cet.2, (Jakarta: Qisthi Pers, 2017), hlm. 9.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*. (Jakarta, 2014), hlm. 2.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996).
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1958).
- Sayyid Qutb. *Ma'alim fi al-Tariq*. (Beirut: Dar al-Shuruq, 1991).
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum al-Din*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997).

Skripsi

- Kartina. "Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perspektif Fiqh Siyasah." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Banda Aceh, 2023).

- Feti Fajriyanti. "Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang Jatinegara Kabupaten Tegal Bagi Kesejahteraan Masyarakat." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022).
- Silvia Pangaribuan. "Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Desa Sitoluama Kecamatan Lagu Boti Kabupaten Toba." (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022).
- Muhammad Nizamuddin Sidqi. "Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif dan Masalahah." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).
- Ahmad Wahyudi. Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Penjabat Kepala Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, pada 20 November 2024.
- Wawancara dengan warga Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, pada 20 November 2024.
- Wawancara dengan Bapak Edy selaku Camat Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, pada 20 November 2024.
- Wawancara dengan Bapak Nurgaini selaku Ketua BPD Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, pada 20 November 2024.
- Wawancara dengan Bapak Karim selaku tokoh agama, pada 21 November 2024.